

# **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura**

**Jofri Wonda<sup>1</sup>, Muh Yamin Noch<sup>2</sup>, Zakaria<sup>3</sup>, Fahrudin Pasolo<sup>4</sup>, Yaya Sonjaya<sup>5</sup>**

<sup>1, 3, 4</sup> **Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia**

<sup>2, 5</sup> **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia**

E-mail Korespondensi: [abienoch12@gmail.com](mailto:abienoch12@gmail.com)

---

## **Abstrak**

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Sampel penelitian berjumlah 64 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 26.0.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sebaliknya, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta menjadi variabel yang paling dominan. Secara simultan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,768 menunjukkan bahwa 76,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh model penelitian.

**Implikasi Penelitian:** Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan penguatan SPIP, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi penerapan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan.*

---

## **Pendahuluan**

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah daerah dituntut mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kualitas laporan keuangan yang baik akan meningkatkan akuntabilitas publik, mendukung pengambilan keputusan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018).

Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam beberapa tahun terakhir berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK masih menemukan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa opini WTP belum sepenuhnya mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan tidak memiliki kelemahan, melainkan hanya menunjukkan kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetap menjadi isu penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta pemanfaatan teknologi informasi. SAP berfungsi sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan dapat disusun secara seragam dan dapat dipercaya (Bastian, 2010). Sementara itu, SPIP berperan dalam memastikan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008). Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan (Widuri, 2010; Arif, 2017).

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Angreini dkk. (2021), Aldino dan Septiano (2021), serta Nurul Fathia dkk. (2020) menemukan bahwa penerapan SAP, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, Kaifah dan Tryana (2020) serta Adhivina dan Hikmahwati (2020) menemukan bahwa sebagian variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan empiris (research gap) yang memerlukan pengujian lebih lanjut dalam konteks dan karakteristik daerah yang berbeda.

Kabupaten Jayapura dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu daerah di Provinsi Papua yang secara konsisten memperoleh opini WTP, namun masih menghadapi berbagai rekomendasi perbaikan dari BPK terkait pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya perbedaan antara capaian opini audit dan kualitas implementasi pengelolaan keuangan pada tingkat organisasi perangkat daerah. Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan pembangunan di wilayah Papua, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah di kawasan timur Indonesia.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Angreini dkk. (2021) yang meneliti pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Penelitian ini mengacu pada penelitian Aldino dan Septiano (2021) serta Nurul Fathia dkk. (2020), Fazlurahman dkk. (2021), serta Kaifah dan Tryana (2020) yang menguji berbagai faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemilihan penelitian-penelitian tersebut didasarkan pada kesamaan variabel penelitian serta relevansi konteks sektor publik sebagai landasan pengembangan model penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian kembali hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dalam konteks Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang masih relatif terbatas dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan pemerintah daerah di Papua yang memiliki karakteristik geografis, administratif, dan tata kelola yang berbeda dibandingkan dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang dilakukan di wilayah Indonesia bagian barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian akuntansi sektor publik mengenai determinan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penguatan implementasi SAP, optimalisasi SPIP, serta pemanfaatan teknologi informasi yang lebih efektif. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

## **Tinjauan Pustaka**

### ***Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah***

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Kualitas laporan keuangan menjadi aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh karakteristik kualitatif informasi keuangan yang dimiliki. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik tersebut meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Informasi yang relevan mampu memengaruhi keputusan pengguna, sedangkan informasi yang andal bebas dari kesalahan material dan dapat diverifikasi. Laporan keuangan harus dapat dibandingkan antarperiode maupun antar entitas serta mudah dipahami oleh para pengguna laporan.

Dalam konteks sektor publik, kualitas laporan keuangan menjadi indikator penting keberhasilan pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan publik, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan berbagai faktor pendukung, seperti penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Mahmudi, 2019; Mardiasmo, 2018).

### ***Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)***

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan menjadi pedoman resmi bagi seluruh entitas pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Kehadiran SAP bertujuan untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah agar dapat digunakan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.

SAP mengatur berbagai aspek pelaporan keuangan pemerintah, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan transaksi keuangan. Penerapan SAP berbasis akrual memungkinkan pemerintah menyajikan informasi keuangan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan basis kas, karena tidak hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi juga mencatat hak dan kewajiban yang timbul selama periode pelaporan. Dengan demikian, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi keuangan pemerintah.

Dalam penelitian ini, penerapan SAP dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik penerapan SAP, semakin tinggi tingkat kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Penerapan SAP diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura (Bastian, 2010; Halim & Kusufi, 2013).

### ***Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP dirancang untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri atas lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang bertujuan memberikan keyakinan akan tercapainya tujuan organisasi, khususnya dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang andal dan akuntabel. Melalui pengendalian yang efektif, pemerintah dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah serta memastikan setiap transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan SPIP yang baik akan mendukung peningkatan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, SPIP berperan penting dalam memastikan seluruh proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem pengendalian yang kuat akan meminimalkan risiko kesalahan, meningkatkan keandalan data keuangan, dan mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. SPIP diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2011; PP Nomor 60 Tahun 2008).

### ***Pemanfaatan Teknologi Informasi***

Teknologi informasi merupakan seperangkat teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara cepat dan akurat. Dalam sektor publik, pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi dan modernisasi sistem pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses administrasi dan pelaporan keuangan dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta sistem informasi keuangan yang terintegrasi. Melalui teknologi informasi, proses pencatatan transaksi, pengolahan data, penyusunan laporan, hingga penyimpanan arsip keuangan dapat dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan akibat faktor manusia (*human error*).

Dalam penelitian ini, pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai faktor yang dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan data keuangan diproses lebih cepat, tepat, dan akurat sehingga menghasilkan informasi yang lebih andal. Semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah (Widuri, 2010; Arif, 2017; PP Nomor 56 Tahun 2005).

### ***Pengembangan Hipotesis***

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya publik secara efektif. Dalam perspektif Stewardship Theory, pemerintah sebagai steward berkewajiban menyajikan informasi keuangan yang berkualitas kepada masyarakat, sedangkan Agency Theory memandang laporan keuangan sebagai sarana untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Meskipun berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil yang diperoleh masih belum konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dalam konteks Pemerintah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang telah dibangun, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

### *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang disusun secara konsisten, relevan, andal, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas pemerintah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat penerapan SAP, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Secara empiris, penelitian Angreini dkk. (2021), Maydiyanti et al. (2020), dan Ardianto (2019) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan mekanisme yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, termasuk keandalan pelaporan keuangan. SPIP yang efektif akan meminimalkan kesalahan pencatatan, mencegah penyimpangan, serta meningkatkan akurasi dan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam perspektif Stewardship Theory, pengendalian internal yang baik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga integritas proses pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Nurul Fathia dkk. (2020), Fazlurahman dkk. (2021), serta Darmawan dan Darwanis (2018) menemukan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih terintegrasi. Teknologi informasi membantu pemerintah mengolah data keuangan, menyimpan informasi, serta menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu dan meminimalkan kesalahan akibat faktor manusia (*human error*). Perkembangan sistem informasi keuangan daerah telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penggunaan teknologi yang lebih modern. Penelitian Angreini dkk. (2021), Aldino dan Septiano (2021), serta Ferdian (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi juga merupakan hasil sinergi berbagai aspek dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, SPIP menjamin keandalan proses pengelolaan keuangan, sedangkan teknologi informasi mendukung efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data keuangan. Ketiga faktor tersebut diharapkan dapat secara bersama-sama meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi penerapan SAP, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap

peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian simultan perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel melalui pengukuran yang terstruktur dan analisis statistik. Penelitian dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada OPD di Kabupaten Jayapura. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, antara lain ASN yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan, serta memiliki pemahaman mengenai penerapan SAP, SPIP, dan sistem informasi keuangan daerah. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berbagai referensi yang relevan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik kuesioner dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan program Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) dengan tahapan yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, serta analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Hasil Penelitian**

Hasil analisis deskriptif statistik menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata (mean) di atas 3,50, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap variabel yang diteliti. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,8500 dengan standar deviasi 0,61666, diikuti oleh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar 3,8328 dengan standar deviasi 0,72682, Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) sebesar 3,8184 dengan standar deviasi 0,62532, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_1$ ) sebesar 3,7255 dengan standar deviasi 0,74897. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAP, efektivitas SPIP, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura berada dalam kategori baik. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata pada seluruh variabel mengindikasikan bahwa jawaban responden relatif homogen dan tidak menunjukkan penyebaran data yang tinggi, sehingga data penelitian dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai kondisi variabel yang diteliti. Nilai *Descriptive Statistics* yang diperoleh dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 1. Descriptive Statistics**

|                    | N  | Min  | Max  | Mean   | Std. Deviation |
|--------------------|----|------|------|--------|----------------|
| Penerapan SAP      | 64 | 2,27 | 4,91 | 3,7255 | ,74897         |
| SPIP               | 64 | 2,30 | 4,90 | 3,8328 | ,72682         |
| Pemanfaatan TI     | 64 | 2,50 | 5,00 | 3,8500 | ,61666         |
| Kualitas LK        | 64 | 2,38 | 5,00 | 3,8184 | ,62532         |
| Valid N (listwise) | 64 |      |      |        |                |

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Hasil uji validitas terhadap seluruh instrumen penelitian menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ), Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ), dan Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) memiliki nilai  $r$  hitung yang lebih besar dibandingkan nilai  $r$  tabel sebesar 0,2423 pada tingkat signifikansi 5%. Seluruh item pernyataan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk yang diteliti secara tepat. Nilai  $r$  hitung pada variabel Penerapan SAP berkisar antara 0,659–0,917; variabel SPIP antara 0,759–0,892; variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi antara 0,601–0,838; dan variabel Kualitas Laporan Keuangan antara 0,659–0,911. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam kuesioner memenuhi kriteria validitas dan layak digunakan untuk analisis penelitian lebih lanjut.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga memenuhi kriteria reliabilitas dan dinyatakan konsisten dalam mengukur konstruk yang diteliti. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,805 yang termasuk kategori sangat reliabel, sedangkan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar 0,627, Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) sebesar 0,628, dan Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) sebesar 0,748 yang termasuk kategori reliabel. Hasil pengujian secara keseluruhan menunjukkan nilai Cronbach's Alpha Based on Standardized Items sebesar 0,718 yang mengindikasikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang baik. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam kuesioner dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian dan layak digunakan untuk analisis data selanjutnya, dengan hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Reliability**

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 0,700            | 0,718                                        | 4          |

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Dari hasil analisis uji reliabilitas diperoleh nilai *alpha Cronbach masing-masing variabel dengan menggunakan program SPSS versi 26.0 for Windows, sebagaimana pada Tabel 5.12* berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel**

| Variabel       | No Item | Cronbach's Alpha | Keterangan      |
|----------------|---------|------------------|-----------------|
| Penerapan SAP  | 11      | 0,805            | Sangat Reliabel |
| SPIP           | 10      | 0,627            | Reliabel        |
| Pemanfaatan TI | 8       | 0,628            | Reliabel        |
| Kualitas LK    | 8       | 0,748            | Reliabel        |

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah memenuhi asumsi dasar regresi sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan penelitian. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Hal ini terlihat dari grafik Histogram dan Normal Probability Plot (P-P Plot) yang menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik residual berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hasil pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,571 dan VIF sebesar 1,753; variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,734 dan VIF sebesar 1,362; sedangkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,484 dan VIF sebesar 2,067. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen pada model regresi. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas dan multikolinearitas, model regresi yang digunakan dinyatakan layak untuk pengujian hipotesis lebih lanjut.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, Hasil persamaan regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t**

|   | Model                                  | Unstandardized Coefficients |            | T <sub>hitung</sub> | Sig   |
|---|----------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------|
|   |                                        | B                           | Std. Error |                     |       |
| 1 | (Constant)                             | ,537                        | ,289       | 1,856               | 0,068 |
|   | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah | ,014                        | ,067       | 0,204               | 0,839 |
|   | Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  | ,705                        | ,061       | 11,569              | 0,000 |
|   | Pemanfaatan Teknologi Informasi        | ,137                        | ,089       | 1,547               | 0,127 |

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 5.16, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 0,537 + 0,014X_1 + 0,705X_2 + 0,137X_3 + e$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) dengan Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ). Nilai konstanta sebesar 0,537 menunjukkan bahwa apabila variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dianggap konstan atau bernilai nol, maka Kualitas Laporan Keuangan bernilai 0,537.

Koefisien regresi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_1$ ) sebesar 0,014 menunjukkan adanya hubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,014 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ) sebesar 0,705 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,705 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Sementara itu, koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) sebesar 0,137 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,137 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Berdasarkan nilai koefisien regresi, variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki koefisien terbesar dibandingkan variabel lainnya, yang mengindikasikan bahwa variabel tersebut memberikan kontribusi paling dominan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura.

### **Hasil Pengujian Hipotesis**

Uji parsial (uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria bahwa apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ) memiliki nilai t hitung sebesar 0,204 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,839. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,839 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan ditolak.

Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ) memperoleh nilai t hitung sebesar 11,569 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) memiliki nilai t hitung sebesar 1,547 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,127. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,127 > 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ditolak.

Berdasarkan hasil uji parsial tersebut, hanya variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, sedangkan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan

**. Tabel 5. Hasil Uji F (uji Simultan)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

|   | <b>Model</b> | <b>Sum of Squares</b> | <b>df</b> | <b>Mean Square</b> | <b>F</b> | <b>Sig.</b>       |
|---|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|-------------------|
|   | Regression   | 19,184                | 3         | 6,395              | 70,397   | ,000 <sup>b</sup> |
| 1 | Residual     | 5,450                 | 60        | 0,091              |          |                   |
|   | Total        | 24,635                | 63        |                    |          |                   |

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Uji simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ). Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.17, diperoleh nilai F hitung sebesar 70,397 dengan tingkat signifikansi sebesar

0,000. Nilai F hitung tersebut lebih besar dari F tabel sebesar 2,7481 ( $70,397 > 2,7481$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Dengan demikian, hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan hasil sinergi antara penerapan standar akuntansi, efektivitas pengendalian internal, dan dukungan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 6. Hasil Uji Determinan**

| Model Summary <sup>b</sup> |                    |          |                   |                            |               |
|----------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| Model                      | R                  | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1                          | 0,882 <sup>a</sup> | 0,779    | 0,768             | 0,30140                    | 1,731         |

Hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,768, yang menunjukkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( $X_2$ ), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi ( $X_3$ ) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan ( $Y$ ) sebesar 76,8%, sedangkan sisanya sebesar 23,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti kompetensi aparatur pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, komitmen organisasi, lingkungan kerja, fasilitas kerja, kompensasi, dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Nilai R sebesar 0,882 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen berada pada kategori sangat kuat, sehingga model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan perubahan kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura.

## **Pembahasan.**

### ***Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan SAP belum mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh belum meratanya pemahaman aparatur terhadap standar akuntansi pemerintahan, sehingga implementasi SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan secara efektif.

Meskipun SAP telah menjadi pedoman resmi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankannya. Standar dan prosedur yang baik tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila aparatur pengelola keuangan belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan secara konsisten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak cukup hanya melalui penerapan SAP, tetapi juga memerlukan dukungan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat kemampuan pegawai pengelola keuangan agar lebih memahami proses penyusunan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, andal, dan akuntabel.

Temuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Angreini dkk. (2021) dan Maydiyanti dkk. (2020) yang menemukan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaifah dan Tryana (2020) yang menyimpulkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, efektivitas penerapan SAP tidak hanya ditentukan oleh keberadaan standar itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas implementasinya.

### ***Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan SPIP, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. SPIP merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dibandingkan variabel lainnya dalam penelitian ini, sehingga keberadaannya menjadi faktor penting dalam mendukung penyajian laporan keuangan yang andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara teoritis, SPIP merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi, efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Melalui pengendalian internal yang efektif, setiap proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai prosedur sehingga risiko kesalahan dan penyimpangan dapat diminimalkan. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan telah dicatat, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan SPIP yang baik akan mendukung terwujudnya laporan keuangan yang lebih akurat, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Angreini dkk. (2021) dan Fazlurahman dkk. (2021) yang menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Adhivina dan Hikmahwati (2020) yang menyatakan bahwa SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dapat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi dan kualitas implementasinya di masing-masing daerah.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat bergantung pada efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat mekanisme pengendalian melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan berkelanjutan, manajemen risiko yang efektif, serta peningkatan kapasitas aparatur. Dengan pengendalian internal yang baik, kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan semakin meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

### ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang ada belum mampu memberikan kontribusi optimal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Meskipun teknologi informasi telah digunakan dalam proses pengelolaan keuangan, keberadaannya belum sepenuhnya mendukung peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

Secara teoritis, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah melalui percepatan proses pengolahan data, peningkatan akurasi informasi, serta penyajian laporan keuangan yang lebih tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya keterlambatan penyampaian laporan keuangan serta belum efektifnya penggunaan sistem informasi keuangan di beberapa OPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaifah dan Tryana (2020), Adhivina dan Hikmahwati (2020), serta Fazlurahman dkk. (2021) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Ferdian (2021) dan Nurul Fathia dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi informasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem secara optimal. Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah agar teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan berkualitas.

*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil sinergi antara penerapan standar akuntansi yang baik, efektivitas pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan ketiga aspek tersebut.

Secara konseptual, penerapan SAP berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, SPIP berperan dalam memastikan keandalan informasi keuangan melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian, sedangkan teknologi informasi mendukung percepatan pengolahan data dan penyajian laporan keuangan secara lebih akurat dan tepat waktu. Kombinasi ketiga faktor tersebut mampu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan ketelitian dalam proses pelaporan, serta mendukung terciptanya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Angreini dkk. (2021) yang menemukan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Temuan ini didukung oleh penelitian Fazlurahman dkk. (2021) serta Maydiyanti dkk. (2020) yang menyimpulkan bahwa kombinasi penerapan SAP, SPIP, dan pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu terus meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan, memperkuat implementasi SAP, menjaga konsistensi pelaksanaan SPIP, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sistem pengendalian yang efektif, dan teknologi informasi yang memadai, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat sehingga mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

## Kesimpulan.

Hasil penelitian mengenai pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura menunjukkan bahwa secara parsial Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sementara itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam penelitian ini. Secara simultan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 76,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak cukup hanya melalui penerapan standar akuntansi dan penyediaan teknologi informasi, tetapi juga memerlukan sistem pengendalian internal yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memperkuat implementasi SPIP melalui peningkatan pengawasan, pengendalian risiko, kepatuhan terhadap prosedur, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi. Peningkatan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknis perlu dilakukan agar penerapan SAP dan pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Papua maupun daerah lainnya di Indonesia. Kedua, data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang mengandalkan persepsi responden sehingga masih memungkinkan terjadinya subjektivitas dalam pemberian jawaban. Ketiga, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, sehingga belum mampu menjelaskan seluruh faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan wilayah penelitian ke beberapa kabupaten/kota atau pemerintah provinsi agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi. Penelitian mendatang dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah, budaya organisasi, pengawasan internal, serta kualitas audit. Penggunaan metode campuran (*mixed methods*) yang mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

- Aldino, H. P., & Septiano, R. (2021). Pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi, teknologi informasi, pengendalian internal, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. *Menara Ekonomi*, 7(2).
- Angreini, K. A., dkk. (2021). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Jayapura dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *ACC-JU*, 4(2).
- Ardianto, R. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136.
- Darmawan, A., & Darwanis. (2018). Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi, kompetensi sumber daya manusia, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(1), 9–19.
- Fazlurahman, F., dkk. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening (studi pada BPKA Kota Bandung). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(2), 250–265.
- Kaifah, U., & Tryana, A. L. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 26–37.
- Maydiyanti, S., Putri, A. M., & Anriva, D. H. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10(1), 69–78. <https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1975>
- Nurul Fathia, dkk. (2020). Pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *PEKBIS Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh kesadaran, pemahaman, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderasi preferensi risiko. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1738>
- Pravasanti, Y. A. (2019). Pengaruh kualitas aparatur daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *AKTSAR*, 2(2), 199–214.
- Ferdian, T. (2021). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Akrab Juara*, 6(5), 35–48.
- Widodo, S., & Maharani, R. R. (2021). Pengujian kualitas informasi dalam laporan keuangan pada organisasi perangkat daerah. *Journal of Business and Information Systems*, 3(1), 60–74.

### Buku

- Arikunto, S. (2017). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ke-3)*. Erlangga.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2017). *Teori akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariat dengan program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Teori, konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2017). Sistem akuntansi (4th ed.). Salemba Empat.
- Noch, M. Y., & Husen, S. (2015). Metode penelitian untuk akuntansi dan manajemen. Perdana Publishing.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

#### ***Peraturan Perundang-Undangan***

- , Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- , Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , Republik Indonesia. (2015). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- , Pemerintah Provinsi Papua. (2014). Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.
- , Pemerintah Provinsi Papua. (2019). Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.